

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN DIBIDANG KESEHATAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT

Nopiani

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Tribhuwana Tungadewi
Email: tonang151195@gmail.com

***Abstract:** Health development is efforts carried out by all component of the indonesia nation to improving awareness, desire, ability to live leashty to everyone to be realized the highest degree of public health. The researcher using qualitative research. Technique data collection using interview, observation, and documentation. Data obtained such primary data, and secondary data. Side determination techniques use purposive sampling. After the data obtained, the data analyzed by step in data reduction, presentation of data and draw conclusion. Credibility test the data validity. The researcher use triangulation technique way. The implementation of development program in the health sector in improving public health In Sumbergondo, Bumiaji Districts Batu, really well. According to communication perspective which delivered by socialization in development program activities in the health that participation in taking a decision, implementation, and evaluation in which there are human resource being main capital and supporting factor in term of work to help improving and maintaining the quality of health care institutions.*

Key word: Implementation, Development, Health Program

Abstrak: Pembangunan kesehatan adalah upaya yang di laksanakan oleh semua komponen bangsa indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Peneliti ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang di peroleh berupa data primer dan data sekunder. Teknik penentuan sampling menggunakan Purposive Sampling. Setelah data diperoleh, data dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data dalam menguji kevalidan data tersebut, maka peneliti menggunakan cara triangulasi teknik. Implementasi program pembangunan di bidang kesehatan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu sangat baik, berdasarkan dari perspektif komunikasi yang disampaikan melalui sosialisasi kegiatan program pembangunan di bidang kesehatan baik partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi dimana adanya sumber daya manusia menjadi modal utama dan faktor pendukung dalam hal bekerja untuk membantu meningkatkan dan memelihara mutu lembaga pelayanan kesehatan.

Kata Kunci: Implementasi, Pembangunan, Kesehatan

PENDAHULUAN

Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 mengemukakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hak untuk hidup sehat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia. Kondisi sehat badan dan jiwa akan memungkinkan setiap manusia untuk melakukan aktivitas dan karyanya. Kemudian di dalam pasal 34 dijelaskan tentang kewajiban negara, sebagai berikut: Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara, Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan kurang mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan merupakan hak asasi manusia dengan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Juga dipertimbangkan bahwa di setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Pembangunan kesehatan merupakan komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin, (Rachmat, 2016: 12). Dari sekian banyak perencanaan pembangunan, salah satunya adalah pembangunan di bidang kesehatan.

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus dapat menjamin hak masyarakat luas untuk hidup sehat dengan memberikan pelayanan kesehatan secara merata, adil, memadai, terjangkau, dan berkualitas. Pembangunan di bidang kesehatan melibatkan peran aktif masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada. *Masyarakat semestinya berhak untuk memperoleh derajat kesehatan yang sama dan berkewajiban ikut serta dalam usaha kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Untuk itu maka diperlukan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, yang pada hakikatnya terpenuhi sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan (Rachmat, 2016: 20).*

Derajat masyarakat miskin yang masih kurang diakibatkan karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Kesulitan akses ini diakibatkan oleh berbagai faktor seperti ketidak adanya kemampuan secara ekonomi dikarenakan biaya kesehatan yang memang mahal. Hal tersebut memacu pemerintah daerah untuk memunculkan terobosan dan kebijakan di bidang kesehatan. Maka Keberadaan Posyandu di tengah-tengah masyarakat mempunyai peranan yang sangat besar, karena menyangkut pemenuhan kebutuhan yang sangat vital bagi kesehatan ibu dan anak. Kegiatan posyandu tumbuh dari oleh dan untuk masyarakat, sehingga pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab bersama terutama warga masyarakat. Peningkatan kualitas layanan kader posyandu menjadi tonggak penting yang harus diperhatikan. Namun perlu digaris bawahi bahwa sebaik-baiknya suatu program ataupun kebijakan akan gagal bila di tataran pelaksanaannya tidak dilakukan dengan baik dan benar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, serta lokasi penelitian yang dipilih yaitu Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Jln. Sumbergondo No. 6 Telp (0341) 591188 Bumiaji 65335 Kota Batu. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dan informannya yaitu Sekretaris Desa, Kasie Pembangunan dan Pemberdayaan, Kasie Kesejahteraan Rakyat, Warga/Masyarakat, Ibu Kader Posyandu. Data diperoleh dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui: observasi (pengamatan), interview (wawancara) dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti sendiri, panduan wawancara dan catatan lapangan. Teknik analisis data menggunakan *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi) serta keabsahan data dengan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Pembangunan Di Bidang Kesehatan Dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Di Desa Sumbergondo

Dalam mengimplementasikan Program Pembangunan Di Bidang Kesehatan Dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Di Desa Sumbergondo dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan oleh George Edward III, dan menggabungkan seluruh komponen hasil penelitian yakni: hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta keabsahan data dengan menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data. Adapun model-model implementasi kebijakan publik menurut (Edward Dalam Winarno (2014), yaitu:

Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik dan sikap tanggapan dari pihak yang terlibat. Secara umum Edward membahas tiga hal penting dalam komunikasi yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Faktor utama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan agar menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya sudah dikeluarkan.

Sedangkan jika kebijakan-kebijakan yang ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, Maka tugas dan fungsi dari pemerintah Desa Sumbergondo dalam mengkomunikasikan maupun mensosialisasikan suatu program pembangunan di bidang kesehatan haruslah bersifat jelas dan transparan, karena dalam hal ini komunikasi sangat menentukan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan khususnya pembangunan posyandu yang ada di Desa Sumbergondo. jika komunikasi sudah berjalan dengan baik maka untuk proses pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik pula.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sumbergondo diketahui bahwa komunikasi dalam kegiatan program pembangunan di bidang kesehatan baik partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan pembangunan sangat di butuhkan sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan peran dari perempuan maupun kader posyandu yang dimana dalam pelaksanaan program kerja dari posyandu peran kader lah yang sangat di utamakan karena pemerintah desa hanya memberikan pelatihan dan penyuluhan melalui acara tahlilan maupun pertemuan-pertemuan, dari hasil pertemuan tersebut masing-masing kader mempunyai tugas untuk menyampaikan program kerja posyandu kepada masyarakat. Jadi di sini masyarakat tidak diikutsertakan dalam pertemuan, melainkan masyarakat hanya berperan aktif dalam berlangsungnya kegiatan program yang sudah di susun oleh kader posyandu.

Sumber Daya (*Resource*)

Sumber daya merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan. Sumber-sumber yang penting tersebut bisa meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, serta sumber daya yang mendukung terwujudnya pelayanan-pelayanan serta pembiayaan terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Ketersediaan Sumber daya yang menjadi faktor pendukung dari program pembangunan di bidang kesehatan di Desa Sumbergondo adalah modal utama dalam hal bekerja untuk membantu meningkatkan dan memelihara mutu lembaga pelayanan kesehatan dengan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan alat-alat yang di butuhkan seperti timbangan, manometer, stetoskop dll.

Namun berdasarkan hasil penelitian di Desa Sumbergondo diketahui untuk pengelolaan sumber daya manusia tersebut di serahkan sepenuhnya ke kader-kader posyandu untuk di kelola semaksimal mungkin. Tetapi tidak menuntut kemungkinan masih ada kekurangan yang di hadapi

kader posyandu dimana terdapat beberapa alat seperti timbangan yang ada tapi sudah rusak, lemari tempat buku, dan tempat sampah juga belum ada. Dalam mengatasi permasalahan tersebut bagaimana pemerintah desa sebagai mengambil kebijakan untuk mengantisipasi masalah yang ada dengan memberikan kebutuhan atau peralatan yang kurang.

Disposisi Atau Sikap (*Disposition Or Attitude*)

Sikap dan komitmen merupakan hal yang sangat penting dan utama dalam sebuah organisasi, Dalam pelaksanaan implementasi program pembangunan di bidang kesehatan tentu harus ada kesiapan dari pemerintah desa maupun kader-kader posyandu terutama dalam pelaksanaan tersebut dan juga harus ada dukungan dari masyarakat.

Dari hasil penyajian data di atas maka tingkat sikap dan komitmen dari Pemerintah Desa Sumbergondo sendiri sudah dikatakan cukup baik, karena dilihat adanya kerja sama yang dibangun dari sebuah organisasi dan pemerintah desa juga selalu peka berhubungan dengan dinas maupun kader-kader posyandu agar terciptanya kerja sama yang baik. Contohnya seperti pembagian kepanitiaan penyelenggaraan pembangunan yang sudah di tetapkan dan adanya pengawasan antar pemerintah desa dengan bawahan.

Struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Sebuah instansi pemerintah pastinya memiliki struktur birokrasi. Struktur birokrasi tersebut tidak bisa di buat berdasarkan kemauan individu atau kemauan golongan akan tetapi berdasarkan peraturan pemerintah daerah yang mengatur tentang organisasi atau tata kerja pemerintah desa. Jika terdapat suatu kelemahan dalam struktur birokrasi tersebut, implementasi kebijakan tidak akan berhasil. Pada dasarnya struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.

Dari hasil penyajian data di atas pemerintah Desa Sumbergondo dalam hal ini telah memenuhi syarat dimana dalam pembagian tata kerjanya masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja (SOT) Pemerintah Desa. Dalam hal ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Karena struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggaraan implementasi kebijakan publik.

Peran Kepala Desa Terhadap Implementasi Program Pembangunan Di Bidang Kesehatan Dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Di Desa Sumbergondo

Peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan yang dimiliki oleh orang yang berperan di masyarakat, peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang di bawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu. Apabila seorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, dia menjalankan suatu peranan. Apabila beretika dalam kepemimpinan dengan memberikan pelayanan dan fungsi-fungsi tersebut tercipta dengan baik, solid, maka perjalanan roda organisasi pemerintahan dapat dinamis dan terus berjalan dengan baik.

Namun demikian, hasil dari pengamatan peneliti sendiri bahwa peran kepala Desa Sumbergondo sebagai unit pengambil kebijakan apapun yang direncanakan dalam pembangunan desa tanpa persetujuan dari kepala desa maka pembangunan tersebut tidak bisa terlaksana. Karena peran kepala desa sebagai kunci utama dalam membuat keputusan dan kebijakan pembangunan. Sedangkan Fungsi kepala Desa Sumbergondo sebagai agen perubahan harus bisa mempunyai kemampuan dalam melakukan pengontrolan secara maksimal, untuk dapat memberikan kesadaran masyarakat yang pada intinya memberi pengaruh yang baik terhadap kepentingan umum.

Begitu juga peran dari kader posyandu yang dimana sebagai panutan dan teladan bagi masyarakat juga berperan aktif dalam pembangunan di bidang kesehatan yang dimana tugas dari peran kader untuk memantau semua kegiatan posyandu seperti pengecekan kesehatan, maupun penyuluhan kegiatan dalam berjalannya proses pelaksanaan program yang di tentukan. Sistem yang kuat juga akan terus bertahan dan meninggalkan suatu jejak yang nantinya akan berjalan sedemikian rupa, keinginan kepala Desa Sumbergondo untuk menciptakan bagaimana menjaga etika dalam memimpin dengan memberikan pelayanan publik yang lebih baik Di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

KESIMPULAN

1. Implementasikan Program Pembangunan Di Bidang Kesehatan Dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu sangat baik, berdasarkan dari perspektif komunikasi yang disampaikan melalui sosialisasi kegiatan program pembangunan di bidang kesehatan baik partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi dimana adanya sumber daya manusia menjadi modal utama dan faktor pendukung dalam hal bekerja untuk membantu meningkatkan dan memelihara mutu lembaga pelayanan kesehatan sedangkan tingkat sikap dan komitmen dari pemerintah desa terhadap bawahan harus adanya kerja sama yang di bangun dari sebuah organisasi. Dan untuk struktur organisasi sebuah instansi pemerintah desa masih mengarah atau berpatokan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja (SOT) Pemerintah Desa.
2. Peran yang baik yang diharapkan yang dimiliki oleh orang yang berperan di masyarakat bisa dikatakan sangat baik, Sebagai pemimpin dalam proses perubahan apabila beretika dalam kepemimpinan dengan memberikan pelayanan dan fungsi-fungsi tersebut tercipta dengan baik, solid maka perjalanan roda organisasi pemerintahan dapat dinamis dan terus berjalan dengan baik. Sistem yang kuat juga akan terus bertahan dan meninggalkan suatu jejak yang nantinya akan berjalan sedemikian rupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R.2013. *Pembangunan Perdesaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada.
- Rachmat, Habib Hasara. 2016. *Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Di Indonesia*, Yoyakarta, Gadjah Mada Universiti Press.
- Ramli, Dkk. 2014. *Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara*. UNMUL. Ejournal Administrative Reform Volume 2, Nomor 1 (2014), Issn. 0000-0000 (Online) Http://. Diakses Pada Tanggal 18 November 2017.
- Sjafrizal, 2015 *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalaam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sinambela poltak litjan. 2016. Reformasi pelayanan publik teori, kebijakan implementasi. Jakarta: bumi aksara.
- Soerjono, Soekanto. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sinambela poltak litjan. 2016. Reformasi pelayanan publik teori, kebijakan implementasi. Jakarta: bumi aksara.
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang, Cv. Cita Intrans Selaras.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*.
- Undang-Undang Dasar 1945*.
- Undang-Undang Nomor 36 Tentang Tenaga Kesehatan*